

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Sumenep. Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam memepertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan peran BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD (Samidi : 2021).

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah melalui pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai indikator yang dipengaruhi tinggi rendahnya penghasilan daerah tersebut, dapat dilihat dari tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh faktor baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Sudarsono & Resdianto,2011).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pendapatan BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, dan didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Penda. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah maka diharapkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat (Hartati, 2013).

Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi, serta pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian,2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bersumber dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan (4) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan untuk mengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh suatu daerah. Oleh karena itu dari ke empat sumber diatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Badan Usaha yang bersumber dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan. Sehingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di pulau Madura, letaknya berada disebelah timur laut Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan “pulau garam”. Kabupaten Sumenep adalah kabupaten yang memiliki beberapa badan usaha salah satunya adalah Badan Usaha Milik Daerah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Sehingga menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan dan mengelola pendapatan asli daerah.

Perlu diketahui jumlah PAD di Kabupaten Sumenep selama tiga tahun terakhir, secara akumulatif mengalami peningkatan yang positif. Pada tahun 2021 jumlah PAD Kabupaten Sumenep senilai Rp. 2.311.242.385.198. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.349.231.639.361. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah PAD Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.420.643.286.694. (Sumber : data APBD Kabupaten Sumenep)

Dalam hal tersebut pendapatan (*Revenue*) suatu perusahaan selain memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan utama juga memperoleh pendapatan yang berasal dari kegiatan transaksi lainnya, Harnanto (2019:102) maka pendapatan dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu Pendapatan Operasional (*Operating Revenue*) dan Pendapatan Non Operasional (*Non Operating Revenue*) :

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan.

Dalam hal tersebut tentu perlu dilakukan analisis mengenai pendapatan BPRS dengan melakukan kegiatan memeriksa atau menyelidiki pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian ini terkait judul yang diusung yaitu **“ANALISIS PENDAPATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SUMENEP”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui Analisis Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana referensi Ilmu Administrasi Publik khususnya ilmu BUMN/BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti sebagai pengembangan potensi sumber daya diri dan meningkatkan wawasan dibidang peningkatan pendapatan asli daerah melalui peran badan usaha milik daerah yaitu bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Bagi Lembaga

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan mampu memberikan masukan bagi BPRS agar dapat terus melakukan pengembangan sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai badan usaha milik daerah terkait perbankan syariah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat di paparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan ketertarikan penulis terhadap studi perbandingan BPRS dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 4 Kabupaten Madura. Di latar belakang di jelaskan mengenai fakta-fakta empiris, fakta teoritis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini penulis mendeskripsikan teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diawali dengan analisis terhadap jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi, *grand theory*, serta teori-teori pendukung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini memaparkan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan sebagai alat instrument dalam melaksanakan penelitian terdiri dari jenis penelitian fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa dan teknik keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan umu dari objek penelitian, baik berupa gambaran umum kecamatan, visi dan misi kecamatan, geografis, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data, menguraikan tentang deskripsi data hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan data hasil penelitian yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

BAB VI PENUTUP

Bab ini disampaikan kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan.

